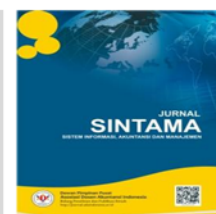




**SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi,
Akuntansi dan Manajemen**
journal homepage: <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai>



Akuntansi Forensik Sebagai Instrumen Antikorupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Literatur

Thea Erin Kristy Br Ginting Suka

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Negeri Medan,
e-mail : theaein2203@gmail.com

Penulis Korespondensi. Thea Erin Kristy Br Ginting Suka
e-mail : theaein2203@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 31 Mei 2025
Diterima: 31 Mei 2025
Tersedia Online: 31 Mei 2025

Kata kunci:

Akuntansi Forensik,
Antikorupsi, Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah, Tinjauan Literatur

A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kerugian negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntansi forensik hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya mendeteksi kecurangan, tetapi juga menyediakan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi dalam sektor pemerintahan daerah melalui kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah, laporan audit, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi lembaga pengawas seperti BPK dan KPK yang relevan dengan topik akuntansi forensik dan pengelolaan keuangan daerah. Analisis dilakukan dengan menelaah temuan-temuan empiris dan teoritis dari berbagai literatur yang dikaji. Hasil menunjukkan bahwa akuntansi forensik berperan dalam mendeteksi pola kecurangan, menyediakan bukti hukum dalam proses litigasi, serta memperkuat efektivitas pengawasan keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan forensik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived: 31 May 2025
Accepted: 31 May 2025
Available Online: 31 May 2025

Keywords :

Forensic Accounting, Anti-
Corruption, Regional Financial
Management, Local
Government, Literature
Review

A B S T R A C T

This study is motivated by the high level of corruption in regional financial management, which leads to state financial losses and a decline in public trust in local governments. Forensic accounting emerges as an approach not only capable of detecting fraud but also of providing legally admissible evidence. The objective of this research is to analyze the role of forensic accounting as an anti-corruption instrument in regional government through a literature review. This study adopts a qualitative descriptive method using a literature review approach. Data were obtained from scientific journals, audit reports, policy documents, and official publications from supervisory institutions such as the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK), all of which are relevant to forensic accounting and public financial management. The analysis involved a critical synthesis of empirical and theoretical findings from the reviewed literature. The study reveals that forensic accounting plays a significant role in identifying fraud patterns, supporting litigation with legal evidence, and strengthening internal control mechanisms in regional financial management. These findings are consistent with prior research showing that forensic approaches improve transparency and accountability in public sector financial governance.



1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sayangnya, hingga saat ini praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan serius yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Ikhsan (2010) menyebutkan bahwa kompleksitas sistem keuangan daerah dan lemahnya pengawasan internal sering membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, akuntansi forensik hadir sebagai pendekatan yang mampu mengidentifikasi serta mencegah kecurangan melalui analisis mendalam terhadap transaksi keuangan. Ikhsan dan Prianthara (2009) juga menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap proses akuntansi untuk mendeteksi anomali yang dapat menjadi indikasi adanya fraud.

Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu proses pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga 3 Januari 2022, tercatat setidaknya 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota telah diproses hukum karena terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah yang berdampak langsung pada kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Masalah pengelolaan keuangan daerah sering kali melibatkan penyimpangan anggaran, laporan fiktif, dan praktik mark-up belanja. Basir et al. (2021) menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh proses yang kurang transparan dan akuntabel, termasuk penggunaan proposal fiktif yang merugikan negara. Selain itu, BPK juga mengungkap kasus penyimpangan anggaran di Kabupaten Tangerang, seperti mark-up pengadaan barang yang menyebabkan kerugian daerah mencapai miliaran rupiah.

Modus korupsi yang umum terjadi di daerah meliputi manipulasi dalam penyusunan anggaran, pemberian suap, gratifikasi, nepotisme dalam pemberian izin, hingga penyalahgunaan diskresi dalam pengambilan keputusan. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkuat temuan tersebut dengan mencatat bahwa mark-up dan laporan fiktif merupakan dua modus korupsi paling dominan yang muncul dalam proses pengadaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, tindakan manipulasi juga dilakukan dengan memindahkan anggaran ke pos yang tidak semestinya, menciptakan anggaran baru yang tidak sesuai regulasi, hingga memperbesar tunjangan untuk pejabat daerah.

Dengan berbagai temuan riset dan laporan audit serta investigasi media yang kredibel tersebut, semakin jelas bahwa penerapan akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi di sektor publik sangat diperlukan. Akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai pencegah praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan studi literatur. Rumusan masalah yang diangkat adalah: "Bagaimana peran akuntansi forensik sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah menurut kajian pustaka?" Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi forensik, sementara secara praktis dapat menjadi referensi bagi auditor, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di sektor publik.

2. STUDI LITERATUR

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah jenis akuntansi yang menggunakan pengetahuan tentang akuntansi, audit, dan penyelidikan untuk menemukan dan membuktikan kecurangan atau kegiatan ilegal dalam urusan keuangan. Tujuan utama akuntansi forensik adalah memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam persidangan untuk kasus hukum, baik pidana maupun perdata. Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan akuntansi dalam konteks hukum untuk menemukan dan membuktikan kecurangan. Praktik ini berbeda dengan audit biasa karena tidak hanya mencari kepatuhan dan keadilan laporan keuangan, tetapi juga mencari niat, manipulasi, dan pelanggaran hukum. Akuntansi forensik juga mengharuskan akuntan untuk dapat bersaksi sebagai saksi ahli di pengadilan, membaca dokumen keuangan dengan cara yang membantu mereka memahami apa yang terjadi, dan menggunakan metode khusus untuk menganalisis data yang tidak terstruktur.

Prinsip dan Prosedur Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik memiliki sejumlah langkah penting, seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan menyusun laporan investigasi. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami audit, hukum, dan kemampuan berpikir kritis. Akuntan forensik harus mampu bekerja secara mandiri dan tanpa bias, serta mampu melacak aliran dana untuk menemukan kemungkinan kecurangan. Salah satu kompetensi utama dalam akuntansi forensik adalah kemampuan untuk menghubungkan bukti transaksi dengan konteks hukum yang lebih luas, serta kemampuan mengkomunikasikan temuan secara efektif kepada pihak penegak hukum atau lembaga pengawasan.

Akuntansi Forensik dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi forensik juga merupakan bagian penting dari manajemen keuangan publik, terutama di tingkat pemerintah daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Ikhsan (2010), penerapan akuntansi forensik di sektor publik dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan dalam manajemen keuangan daerah. Dengan menggunakan analisis tren, pemeriksaan dokumen, dan wawancara, akuntan forensik dapat mengidentifikasi pola mencurigakan dalam laporan keuangan. Selain itu, Ikhsan dan Prianthara (2009) menekankan bahwa penguasaan proses bisnis dan sistem informasi akuntansi merupakan syarat untuk efektivitas akuntansi forensik. Oleh karena itu, integrasi akuntansi forensik dalam pengelolaan keuangan daerah diyakini dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah korupsi.

Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sangat rentan terhadap korupsi. Korupsi di sini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pembengkakan anggaran (mark-up), pengadaan fiktif, penyalahgunaan dana, dan suap dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan. Berdasarkan Seknas FITRA (2021), korupsi dimulai dari proses penyusunan anggaran, yang menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya akuntabilitas di pemerintahan daerah. Proses penyusunan anggaran yang tidak partisipatif dan kurangnya pengawasan publik memberikan ruang bagi aktor politik dan birokrat untuk memasukkan kepentingan pribadi ke dalam pengeluaran publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia, dalam laporan audit terbaru mereka, juga menemukan ribuan ketidakberesan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembayaran berlebihan, penyimpangan spesifikasi pengadaan, dan penggunaan dana publik untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Temuan ini

menunjukkan bahwa korupsi bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan investigasi yang kuat untuk diungkap, termasuk penerapan akuntansi forensik.

Peran Akuntansi Forensik dalam Mencegah dan Membongkar Korupsi

Akuntansi forensik juga sangat penting sebagai mekanisme penegakan hukum dan pencegahan korupsi di pemerintahan lokal. Melalui sifatnya yang berbasis bukti dan investigatif, akuntansi forensik mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan lebih efektif dibandingkan audit tradisional. Sebuah penelitian akademis oleh Aminah dan Syamsuddin (2020) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik membantu secara signifikan dalam mendeteksi kecurangan dan meningkatkan transparansi di sektor publik.

Regulasi dan Dukungan Institusional

Akuntansi forensik di Indonesia semakin diakui untuk mendukung pekerjaan lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akuntan forensik umumnya terlibat dalam audit investigatif terhadap dugaan ketidakberesan dalam laporan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menetapkan posisi auditor sebagai penjaga keuangan publik, termasuk penerapan metode akuntansi forensik dalam kegiatan mereka.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan kontribusi akuntansi forensik sebagai alat anti-korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sumber literatur yang relevan dan kredibel.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena melalui deskripsi dan pemahaman konseptual dari berbagai literatur ilmiah tanpa mengumpulkan data primer. Alih-alih menggunakan survei, wawancara, atau pengamatan langsung, penelitian ini menganalisis data yang dikumpulkan dari sumber sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: (a). Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional. Pengumpulan data dilakukan terutama melalui pencarian artikel di Sinta dan Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan kata kunci spesifik seperti peran akuntansi forensik dalam deteksi penipuan, manajemen keuangan regional yang efektif, deteksi penipuan, dan lainnya. Artikel yang dipilih adalah yang relevan dengan topik penelitian saya. (b). Buku Teks Akademik. Buku dikumpulkan melalui perpustakaan perguruan tinggi dan pencarian daring melalui katalog digital seperti Perpustakaan Nasional, Open Library, serta sumber seperti Academia.edu. Buku yang digunakan adalah buku yang relevan dengan topik akuntansi forensik (c). Laporan Resmi Lembaga Negara. Laporan diperoleh dari situs resmi lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pengumpulan dilakukan dengan mengunduh dokumen seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Tahunan KPK, dan publikasi ICW tentang tren korupsi daerah. (d). Dokumen Hukum dan Perundang-Undangan. Dokumen hukum dikumpulkan dari situs resmi. Dokumen yang digunakan mencakup: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntansi forensik dapat berperan sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil telaah literatur, ditemukan beberapa temuan ilmiah yang dapat dijelaskan secara sistematis berikut ini.

4.1 Rangkuman Hasil Klasifikasi Literatur

No	Sumber	Tema/Subtema	Temuan Utama
1.	Tuanakotta (2010)	Teori dasar akuntansi forensik	Akuntansi forensik mencakup teknik audit dan investigasi hukum untuk deteksi kecurangan
2.	Harahap & Riani (2022)	Studi kasus daerah – pengadaan	Audit forensik mampu mendeteksi rekayasa harga pengadaan alat kesehatan
3.	KPK (2021)	Peran dalam litigasi	67% kasus korupsi berhasil ditangani karena adanya bukti dari audit investigatif
4.	BPK (2022)	Audit investigatif nasional	Audit investigatif di 5 provinsi mengungkap kerugian Rp85 miliar
5.	Suhardjanto & Febrianti (2021)	Efektivitas audit forensik	Daerah dengan audit forensik mengalami penurunan temuan korupsi dan meningkatnya integritas
6.	ICW (2022)	Pola korupsi di daerah	Dominan pada mark-up, hibah fiktif, dan gratifikasi
7.	Fitra (2021)	Korupsi sejak perencanaan anggaran	Proses korupsi sering dimulai sejak tahap perencanaan
8.	Nurhalimah et al. (2020)	Kendala penerapan	72% responden menyebut kurangnya pelatihan sebagai penghambat penerapan audit forensik
9.	Ikhsan (2010, 2014), Ikhsan & Prianthara (2009)	Akuntansi sektor publik & pengawasan	Lemahnya pengawasan keuangan daerah butuh pendekatan investigatif berbasis data forensik
10.	Media Indonesia (2020)	Modus korupsi	Mark-up dan manipulasi data keuangan masih terjadi luas di pemerintahan daerah
11.	UU No. 17/2003; UU No. 31/1999	Aspek hukum	Dasar hukum pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan pengelolaan keuangan negara

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Bagaimana akuntansi forensik berperan dalam mendeteksi korupsi di pemerintahan daerah?

Akuntansi forensik berperan sebagai alat deteksi korupsi yang lebih mendalam dibandingkan audit konvensional. Bila audit biasa menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, akuntansi forensik justru fokus mengungkap motif, pola, dan niat kecurangan di balik angka-angka laporan. Pendekatan ini menggabungkan teknik audit, hukum, dan investigasi untuk membaca anomali dalam. Sebagai contoh, Harahap dan Riani (2022) menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi forensik berhasil membongkar praktik mark-up dalam

pengadaan alat kesehatan di salah satu kabupaten di Jawa Barat—sesuatu yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh audit reguler.

Dengan demikian, peran akuntansi forensik dalam mendeteksi korupsi di daerah sangat krusial. Ia bukan hanya membantu menemukan penyimpangan, tetapi juga memperkuat kemampuan pengawasan negara dalam mengungkap kejahatan keuangan secara sistemik dan berbasis bukti.

Apa kontribusi akuntansi forensik terhadap proses hukum dalam kasus korupsi?

Akuntansi forensik tidak hanya berhenti pada tahap deteksi, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor publik. Berbeda dari audit biasa yang fokus pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, akuntansi forensik menghasilkan laporan investigasi yang bersifat litigatif—yakni dapat digunakan secara langsung sebagai alat bukti dalam persidangan. Laporan tersebut tidak hanya memuat angka atau deviasi akuntansi, tetapi juga merangkum kronologi kejadian, identitas pihak yang terlibat, pola transaksi mencurigakan, serta perhitungan kerugian keuangan negara secara detail. Komisi Pemberantasan Korupsi (2021) mencatat bahwa lebih dari 60% kasus korupsi yang berhasil dibawa ke pengadilan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memiliki dukungan bukti berupa hasil investigasi keuangan forensik. Hal ini menggarisbawahi peran strategis akuntansi forensik dalam membantu aparat penegak hukum menemukan dan menyusun bukti berbasis data yang kuat. Bahkan, dalam banyak kasus, tanpa dukungan laporan forensik, proses hukum sering kali tidak dapat berlanjut karena kurangnya pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dalam tindakan korupsi. Maka, kontribusi akuntansi forensik dalam proses hukum tidak dapat dipisahkan dari efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Sejauh mana akuntansi forensik meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah?

Pengawasan keuangan daerah selama ini sering terkendala pada pendekatan yang bersifat administratif, di mana temuan audit lebih bersifat deskriptif dan formalitas. Akuntansi forensik, di sisi lain, menawarkan pendekatan yang lebih tajam dengan orientasi pada pembuktian dan pendalaman struktur penyimpangan. Ini membawa efek langsung pada peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Laporan BPK tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan investigatif dalam audit pengadaan di lima provinsi berhasil mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp85 miliar. Daerah yang menerapkan audit investigatif berbasis akuntansi forensik mengalami penurunan signifikan dalam jumlah temuan korupsi pada dua tahun berturut-turut. Efektivitas pengawasan tidak hanya terlihat dari hasil pengungkapan kerugian negara, tetapi juga dari peningkatan persepsi publik terhadap integritas pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga secara tidak langsung menjadi alat pencegah yang mampu membentuk budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Apa implikasi penerapan akuntansi forensik bagi kebijakan dan kelembagaan daerah?

Temuan-temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang cukup signifikan. Pertama, akuntansi forensik seharusnya menjadi bagian integral dari sistem

pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya di lingkup Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Transformasi kelembagaan dari audit administratif ke arah pengawasan berbasis risiko dan deteksi fraud mutlak diperlukan. Kedua, APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu memperluas mandat dan kapasitasnya dengan mengadopsi teknik-teknik akuntansi forensik secara sistematis, termasuk melalui pelatihan sumber daya manusia, penggunaan perangkat digital audit, dan penerapan fraud triangle analysis dalam proses pengawasan. Ketiga, secara regulatif, perlu adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk menyusun pedoman teknis akuntansi forensik dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengawasan terhadap belanja modal, dana hibah, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur yang rawan manipulasi. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

Apa tantangan utama dalam implementasi akuntansi forensik di pemerintahan daerah?

Meski memiliki potensi besar, penerapan akuntansi forensik di tingkat daerah tidak lepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak auditor internal di pemerintah daerah belum memiliki kompetensi teknis di bidang investigasi keuangan atau belum tersertifikasi sebagai akuntan forensik. Hal ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap pelatihan yang berkualitas. Tantangan kedua adalah ketiadaan regulasi teknis yang eksplisit yang mewajibkan atau bahkan mendorong pemanfaatan akuntansi forensik sebagai alat pengawasan. Tanpa dasar hukum yang kuat, lembaga pengawasan internal sering kali kesulitan untuk membenarkan penggunaan metode investigatif dalam tugas mereka.

Tantangan ketiga, yang tak kalah penting, adalah minimnya political will dari sebagian aktor pemerintahan daerah. Dalam beberapa kasus, pejabat daerah justru bersikap resistif terhadap upaya audit mendalam karena berpotensi mengungkap konflik kepentingan atau penyimpangan struktural yang melibatkan mereka secara langsung. Keberhasilan akuntansi forensik di tingkat daerah tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada komitmen politik dan dukungan struktural yang kuat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik memiliki peran strategis sebagai instrumen antikorupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini tidak hanya mampu mendeteksi kecurangan melalui teknik audit yang berbasis data dan investigasi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam penyusunan bukti hukum untuk mendukung proses penegakan tindak pidana korupsi. Akuntansi forensik terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, memperkuat fungsi kelembagaan pengawas seperti APIP dan BPKP, serta mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Meski demikian, penerapan metode ini masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya regulasi teknis, serta resistensi dari aktor politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, pelatihan yang berkelanjutan, dan komitmen kelembagaan agar akuntansi forensik dapat diintegrasikan secara sistematis dalam pengawasan sektor publik. Gagasan selanjutnya dari penelitian ini dapat

diarahkan pada pengembangan model implementasi akuntansi forensik berbasis risiko dan digitalisasi, yang lebih adaptif terhadap kompleksitas keuangan daerah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. & Syamsuddin. (2020). "Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 1.
- Ikhsan, A., & Priantara, I. B. T. (2009). *Akuntansi untuk manajer*. Graha Ilmu.
- Ikhsan, A., & Dharmanegara, I. B. A. (2014). *Akuntansi dan manajemen keuangan rumah sakit*. Graha Ilmu.
- Ikhsan, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Untuk akuntansi dan manajemen*. Citapustaka Media.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Korupsi Kepala Daerah*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>
- KPK (2021). *Laporan Tahunan KPK*.
- Kumaran Bismis. (2024). *BPKP Temukan Banyak Manipulasi-Penggelembungan Harga di* . Retrieved from <https://kumaran.com/kumaranbisnis/bpkp-temukan-banyak-manipulasi-penggelembungan-harga-di-laporan-keuangan-daerah-23rlSHOZy0V>
- Seknas FITRA. (2021). *Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran*. Diakses dari <https://seknasfitra.org/korupsi-sudah-terjadi-sejak-perencanaan-anggaran/>
- Tuanakotta, T.M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warta Pemeriksa. (2024). (2024). *Temuan BPK Terkait Belanja APBD: Kelebihan Bayar Hingga tak* . Diakses dari <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=52192>